



KKP  
2025  
BENTUK

panganbiru

08  
POVERTY GROWTH

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

PSDKP TAHUNA

STASIUN PSDKP TAHUNA  
2025



DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap semua capaian kinerja dan aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada triwulan berjalan di tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyusunan sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dan seluruh pihak terkait. Semoga motivasi yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tahuna, 17 Juli 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna,



Martin Yermias Luhulima, S.H., M.Si  
NIP. 19750317 200212 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. LKj ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2025.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dilaksanakan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan. Dari 19 IKK tersebut telah terbagi menjadi 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2025 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 104,63% dengan predikat "Baik". Delapan SK tersebut antara lain: SK.1 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif, SK.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan, SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan, SK.4 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif, SK.5 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan, SK.6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan, SK.7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan, dan SK.8 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Alokasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Tahun TA. 2025 sebesar Rp. 14.293.185.000 dengan pagu real sebesar Rp. 11.738.716.000,- dan Realisasi Anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.936.231.328,- dengan persentase capaian sebesar 33,53%.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	2
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
C. Pengukuran Capaian Kinerja .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan II Tahun 2024.....	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	20
C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia dan Keuangan.....	87
BAB IV PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Rekomendasi .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Armada Pendukung Kegiatan Pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna .....	9
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025 .....	14
Tabel 3	Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna .....	18
Tabel 4	"Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" .....	22
Tabel 5	Hasil Capaian ISK.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" Triwulan II Tahun 2025 .....	22
Tabel 6	Perhitungan "Indeks Kinerja Kinerja Kapal Pengawas" Triwulan II Tahun 2025 .....	23
Tabel 7	Target ISK.2 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawasan" .....	26
Tabel 8	Hasil Capaian ISK.2 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Triwulan II Tahun 2025 .....	26
Tabel 9	Perhitungan "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Triwulan II Tahun 2025 .....	27
Tabel 10	Target ISK.3 "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" .....	31
Tabel 11	Hasil Capaian ISK.3 "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" Tahun 2025 .....	32
Tabel 12	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif .....	33
Tabel 13	Target ISK.5 "Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan" .....	34

Tabel 14	Hasil Capaian ISK.4 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” Triwulan II Tahun 2025 .....	35
Tabel 15	Target ISK.5 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” .....	35
Tabel 16	Hasil Capaian ISK.5 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” Triwulan II Tahun 2025 .....	36
Tabel 17	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2. “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP yang Sesuai Ketentuan” .....	37
Tabel 18	Target Kinerja Komponen ISK.6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” .....	38
Tabel 19	Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” Triwulan II Tahun 2025 .....	39
Tabel 20	Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan II Tahun 2025 .....	41
Tabel 21	Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan II Tahun 2025 .....	45
Tabel 22	Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan II Tahun 2025 .....	46
Tabel 23	Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan II Tahun 2025 .....	47
Tabel 24	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3. “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan” .....	49

Tabel 25	Target Kinerja Komponen ISK.7 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” .....	51
Tabel 26	Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.7 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” Triwulan II Tahun 2025 .....	52
Tabel 27	Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2025 .....	55
Tabel 28	Dokumen Nomor Perizinan Berusaha Kapal Perikanan dalam Penangkapan Ikan Terukur yang Diperiksa Kepatuhan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2025 .....	56
Tabel 29	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 4. “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” .....	57
Tabel 30	Target ISK.8 “Indeks Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Tahun 2025 .....	58
Tabel 31	Hasil Capaian ISK.8 “Indeks Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Triwulan II Tahun 2025 .....	58
Tabel 32	Target ISK.9 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” .....	59
Tabel 33	Hasil Capaian ISK.9 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” Triwulan II Tahun 2025 .....	60
Tabel 34	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3. “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai ketentuan” .....	61
Tabel 35	Target ISK.10 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” .....	62
Tabel 36	Hasil Capaian ISK.10 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” Triwulan II Tahun 2025 .....	62

Tabel 37	Realisasi Anggaran Sasara Kerja 6. "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas .....	63
Tabel 38	Target ISK.11 "Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDK Tahuna" .....	64
Tabel 39	Hasil Capaian ISK.11 "Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDK Tahuna" Triwulan II Tahun 2025 .....	65
Tabel 40	Target ISK.12 "Nilai yang Diperkirakan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna" .....	66
Tabel 41	Hasil Capaian ISK.12 "Nilai yang Diperkirakan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025 .....	66
Tabel 42	Target ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" .....	67
Tabel 43	Hasil Capaian ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025 .....	68
Tabel 44	Target ISK.14 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP" .....	69
Tabel 45	Hasil Capaian ISK.14 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP" Triwulan II Tahun 2025 .....	69
Tabel 46	Target ISK.15 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" .....	70
Tabel 47	Hasil Capaian ISK.15 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025 .....	70
Tabel 48	Target ISK.16 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" .....	71

Tabel 49	Hasil Capaian ISK.16 “Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 .....	72
Tabel 50	Target ISK.17 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” .....	72
Tabel 51	Hasil Capaian ISK.17 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” Triwulan II Tahun 2025 .....	73
Tabel 52	Target ISK.18 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” ..	74
Tabel 53	Hasil Capaian ISK.18 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” Triwulan II Tahun 2025 .....	74
Tabel 54	Target ISK.19 “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna” .....	75
Tabel 55	Hasil Capaian ISK.19 “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 .....	76
Tabel 56	Target ISK.20 “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” .....	77
Tabel 57	Hasil Capaian ISK.20 “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 ...	77
Tabel 58	Target ISK.21 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” .....	78
Tabel 59	Hasil Capaian ISK.21 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 .....	79
Tabel 60	Target ISK.22 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” .....	80

Tabel 61	Hasil Capaian ISK.22 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 .....	80
Tabel 62	Target ISK.23 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” .....	81
Tabel 63	Hasil Capaian ISK.23 “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 .....	82
Tabel 64	Target ISK.24 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” .....	83
Tabel 65	Hasil Capaian ISK.24 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna” Triwulan II Tahun 2025 ....	83
Tabel 66	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 7. “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP” pada Stasiun PSDKP Tahuna” .....	84
Tabel 67	Komposisi Golongan dan Kualitas Pendidikan ASN Stasiun PSDKP Tahuna .....	87
Tabel 68	Daftar PPNPN dan PJLP di UPT Stasiun PSDKP Tahuna .....	87
Tabel 69	Rincian Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna .....	87
Tabel 70	Rekomendasi Penutup dan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 .....	90
Tabel 71	Rekomendasi Penutup dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna .....	6
Gambar 2	Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kpl. Talaud dan Wilker Salibabu .....	8
Gambar 3	Tampilan Awal dan Pengukuran Kinerja Pada Kinerjaku .....	17
Gambar 4	Kegiatan Operasi kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2025..	25
Gambar 5	Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Triwulan II Tahun 2025 .....	31
Gambar 6	Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan limbah Triwulan II Tahun 2025 .....	45
Gambar 7	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing Triwulan II Tahun 2025 .....	49
Gambar 8	Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Triwulan II Tahun 2025 .....	56
Gambar 9	Penandatanganan Berkas Perkara P21 dengan Kejaksaan Negeri Kepl Sangihe .....	63

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat elemen tersebut sehingga dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 kepada para *stakeholder* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah

diamanatkan kepada UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Dengan demikian LKj ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

## 2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

### C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 Strategi Ekonomi Biru sebagai Langkah Indonesia menjaga ketahanan pangan dunia antara lain :

1. Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
3. Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
4. Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
5. Program "Bulan Cinta Laut" dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Guna mendukung program tersebut, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap beberapa isu terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP, yaitu:

## 1. Subsektor Penangkapan Ikan

- Tren kasus IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 2 kasus;
- Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI – Filipina;
- Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pencapaian target PNBK sektor kelautan dan perikanan;
- Potensi pelanggaran daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh KII;
- Kuota Penangkapan dalam Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

## 2. Subsektor Pembudidayaan Ikan

- Belum adanya unit budidaya ikan yang terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
- Penggunaan pakan dan obat ikan yang tidak terdaftar dalam register;
- Kegiatan pembudidayaan dan pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

## 3. Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan

- Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang terperiksa;
- Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya;
- Kegiatan pengolahan ikan yang tidak sesuai dengan standar GMP dan SSOP.

#### 4. Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

- Belum adanya pelaku usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang terdaftar/terregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Kegiatan lalu lintas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Potensi tindak pidana penyelundupan pada kegiatan Lalu Lintas Produk Perikanan Tertentu (Benih Bening Lobster).

#### 5. Pencemaran Perairan

- Potensi pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah hasil kegiatan perikanan maupun non perikanan.

#### 6. Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

- Kegiatan perikanan yang bersifat merusak habitat serta kelestariannya, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestariannya (*over fishing*), penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, penggunaan kompresor pada kegiatan penangkapan ikan, serta penyetruman ikan.

#### 7. Pemanfaatan Ikan yang Dilindungi

- Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait ikan serta biota laut yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dalam pemanfaatannya;

- Terdapat beberapa spesies ikan dan biota laut yang minim populasinya dan terancam punah.
8. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - Penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak lain (perseorangan dan swasta) baik berupa PMA/PMDN yang diharuskan melalui mekanisme perizinan;
  - Potensi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut dampak dari kegiatan pemanfaatannya;
  - Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Stasiun PSDKP Tahuna menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- d) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Stasiun didukung dengan 5 Ketua Tim Kerja (Katimja) serta Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna**



- a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Tahuna untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Katimja Dukungan Manajerial :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga.

c) Katimja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas :

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

d) Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan :

Mengkoordinir kegiatan pengawasan sumber daya perikanan mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, pengumpulan informasi dan pelaporan.

e) Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan :

Mengkoordinir kegiatan pengawasan sumber daya kelautan mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, pengumpulan informasi dan pelaporan.

f) Katimja Penanganan Pelanggaran

Mengkoordinir kegiatan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dan sanksi administratif mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tim kerja dan fungsi masing-masing jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan arahan Pimpinan dan Katimja.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik

sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Stasiun PSDKP Tahuna, yang meliputi 1 Satwas SDKP (Satwas SDKP Talaud) dan 1 Wilker PSDKP (Wilker Salibabu).

Gambar 2  
Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kepl. Talaud dan Wilker PSDKP Salibabu



Stasiun PSDKP Tahuna



Satwas SDKP Talaud



Wilker PSDKP Salibabu

Selain itu untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Stasiun PSDKP Tahuna dibekali dengan armada pengawasan berupa 1 Unit Kapal Pengawas KP. Hiu 15 dan 2 Unit Speedboat Pengawasan Napoleon 039 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna dan Speedboat Napoleon 017 dibawah kendali Satwas SDKP Talaud.

Tabel 1 Daftar Armada Pendukung Kegiatan Pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna

Foto Kapal	Nama Kapal	Bahan Kapal	Tahun Pembuatan	Gross Tonnage	Jumlah Awak Kapal
	KP. Hiu 15 Length Of All (LOA) 32, 10 Meter	Alluminium Alloy	2015	153 GT	13 Orang
	Speedboat Napoleon 039 Length Of All (LOA) 12 Meter	Fiber - Reinford Plastic	2015	15 GT	10 Orang
	Speedboat Napoleon 017 Length Of All (LOA) 12 Meter	Fiber - Reinford Plastic	2012	15 GT	10 Orang

#### E. Sistematika Penyajian

Sistem Penyajian LKj Triwulan II Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Tahuna, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi data umum organisasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

##### 2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Stasiun PSDKP Tahuna untuk Periode 2021-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2024.

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian hasil pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

4. Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Triwulan II Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SKP Tahuna dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan terdiri dari: (1) Renstra Ditjen, PSDKP 2021 - 2024 Ditjen Tahun 2021 - 2024; (2) Rencana Kerja; dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Cards (BSC).

### A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PSDKP 2021 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2021 – 2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2021 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen PSDKP.

Arah kebijakan pengawasan SDKP tentunya harus ditindaklanjuti dan diterjemahkan pada kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Satker dalam sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
  - a. Membangun budaya kerja Direktorat Jenderal PSDKP;
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
  - c. Membangun pola karir PNS Direktorat Jenderal PSDKP;
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara;
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speed boat* dan sarana pengawasan lainnya);

- b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya), dengan cara:
  - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK)
  - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi)
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (Kejaksaan Agung);
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
  - e. Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
  - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di lingkaran Pusat;
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
  - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan

- SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawas SDKP melalui POKMASWAS;
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan";
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar;
- g. Membuat inovasi dalam pelayanan publik.

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna secara khusus memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hierarki, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan [Nilai]	75
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan [Indeks]	100
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya	3.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan [Indeks]	100

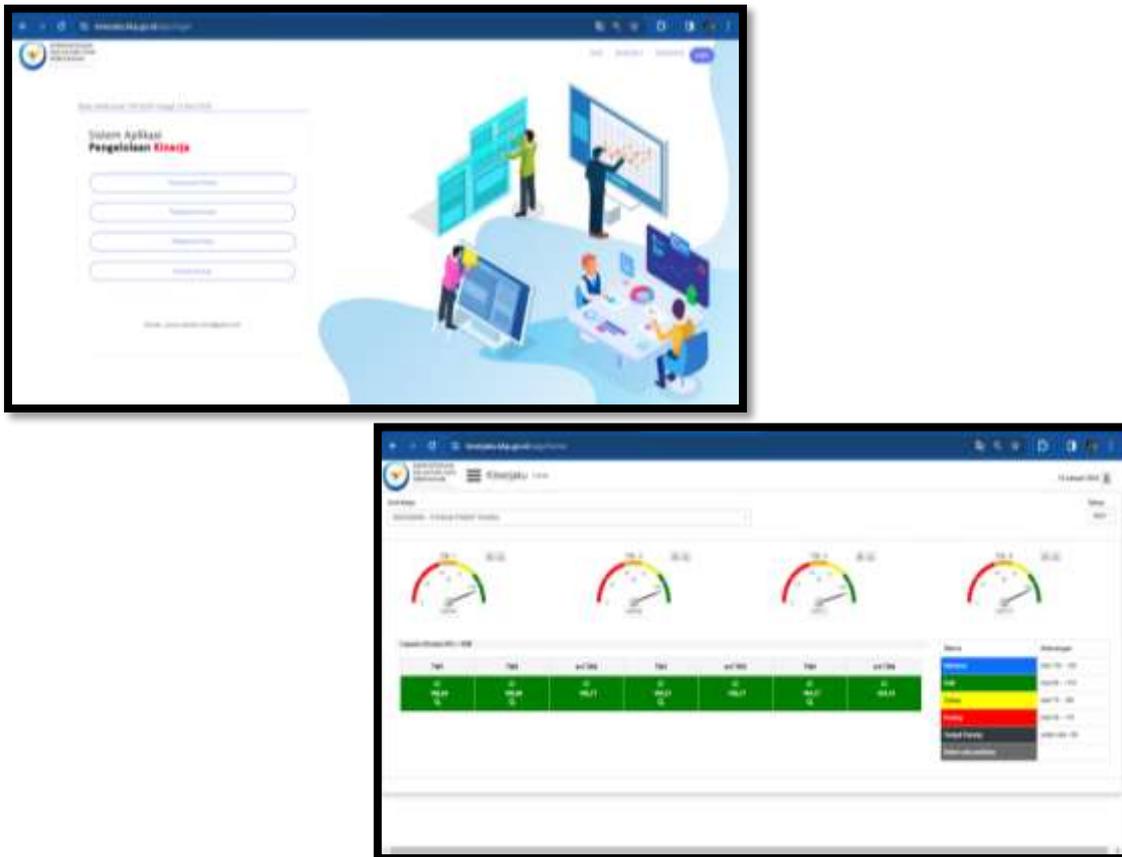
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	perikanan			
SK.4	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	4.	Indeks operasi kapal pengawas [Indeks]	92
		5.	Indeks operasi speedboat pengawas [Indeks]	92
SK.5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP [Persentase]	100
SK. 6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	7.	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks]	81
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [indeks]	94
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	71,5
		10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	92
		11.	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	81
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88
		13.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Persentase]	100
		14.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [Persentase]	
		15. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	88,5
		16. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		17. Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		18. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Unit]	1
		19. Nilai implementasi Program Budaya Kerja [Nilai]	70

### C. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi pada Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

Gambar 3  
Tampilan Awal dan Pengukuran Kinerja pada Kinerjaku



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan II Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna pada akhir Triwulan II Tahun 2025 mendapatkan skor kinerja sebesar 104,63% dengan ditunjukkan pada indikator yang berwarna hijau pada aplikasi *Kinerjaku* dengan predikat "Baik". Stasiun PSDKP Tahuna tetap mempertahankan tren positif dalam perolehan capaian kinerja dengan mendapatkan capaian >100% seperti tahun sebelumnya. Secara terperinci dan spesifik capaian kinerja Stasiun PSDKP Tahuna pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dijelaskan melalui penjabaran informasi sebagai berikut:

##### 1) Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2025 ditabulasikan pada Tabel 3. dibawah ini.

Tabel 3 Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna

Stasiun PSDKP Tahuna	Level II
Martin Yermias Luhulima, S.H., M.Si	Periode Triwulan II Tahun 2025
19750317 200212 1 004	104,63%
Kepala Stasiun PSDKP Tahuna	

Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Triwulan II Tahun 2025	Capaian Triwulan II Tahun 2025	%	Status
SK.1 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif				
IK.1 Tingkat akurasi dan validasi hasil intelijen kelautan (Nilai)				
SK.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan			100,00	●
IK.2 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100,00	100,00	100,00	●

SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan			100,00	
IK.3 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100,00	100,00	100,00	
SK.4 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif				
IK.4 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)				
IK.5 Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)				
SK.5 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan			100,00	
IK.6 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100,00	100,00	100,00	
SK.6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan			100,00	
IK.7 Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	40,00	40,00	100,00	
SK.7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan			120,00	
IK.8 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	40,00	100,00	120,00	
SK.8 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			107,80	
IK.9 Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.10 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	82,00	93,44	113,95	
IK.11 Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna (Indeks)	77,00	81,56	105,92	
IK.12 Penilaian mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				

IK.13 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (%)	100,00	100,00	100,00	
IK.14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95,00	100,00	105,26	
IK.15 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)	88,50	98,41	111,20	
IK.16 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.17 Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna (Unit)				
IK.19 Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)				

Penjelasan warna:  Istimewa (Nilai 110-120)  Baik (Nilai 90 - <110)  Cukup (Nilai 70 - <90)  Kurang (Nilai 50 - <70)  
 Sangat kurang (Nilai <50)  Belum ada penilaian

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, UPT Stasiun PSDKP Tahuna telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN  
KEGIATAN 1**

**TERSELENGGARANYA INTELIJEN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN SECARA EFEKTIF**

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif" Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :

**ISK. 1**

*Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)*

ISK. 1 "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan" ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2025 sebesar 75,00 Target Kinerja ISK.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan	75,00 (Nilai)				

Pada tahun 2025 yang merupakan awal periode Renstra terdapat target Nilai sebesar 75,00. Hingga akhir Triwulan II tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode Tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 5. Berikut ini.

Tabel 5. Hasil Capaian ISK.1 "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	2025 (Nilai)		Persen	2026		Persen	2027		Persen	2028		Persen	2029		Persen
	T	C		T	C		T	C		T	C		T	C	
Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.1 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra serta belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 1. "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan

**SASARAN  
KEGIATAN 2**

**TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN**

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100,00 berpredikat "Baik" dan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :

**ISK. 2**

*Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)*

ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)" ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%, dimana memiliki 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah;
- Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi;
- Kepatuhan pelaku usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut;
- Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Persentase perhitungan nilai terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu : Tahapan persiapan (10%) yang dibuktikan dengan SPT, Surat pemberitahuan dan Daftar pertanyaan; Tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan Usaha dengan peraturan perundang-undangan (70%) yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan dan Formulir pemeriksaan SDK; serta Tahapan pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila kegiatan pengawasan sumber daya kelautan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%.

Target Kinerja ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini.

Tabel 6 Target Kinerja Komponen ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan"

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	RKK 1 PU Ketaatan 100%	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi		-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut		-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>		-	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 1 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Adapun capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada ISK.2 dapat dilihat pada Tabel 7. sebagai berikut :

Tabel 7 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)" Triwulan II Tahun 2025

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029											
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK									
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C								
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025				TW II 2026				TW II 2027				TW II 2028				TW II 2029			
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
limbah																				
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	-	-	-	-	1 PU	1 PU	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Berdasarkan target kinerja Triwulan II Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian kinerja pada ISK.2 sebesar 100,00%. Dari pencapaian kinerja keempat komponen ISK tersebut, maka pada akhir Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai capaian kinerja pada SK.2 di aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik".

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, nilai capaian ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan pada tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga tidak terdapat target ataupun capaian yang bisa dibandingkan. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada akhir Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target jumlah pengawasan pelaku usaha kelautan yang ditentukan. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai

dengan dipersyaratkan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan kelautan terbaru, antara lain:
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
  - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayakelautan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja dari keempat komponen tersebut sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah

Pengawasan pencemaran perairan didasarkan kepada kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, terdapat target serta capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah, rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 8. sebagai berikut.

Tabel 8 Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhan nya Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	KM. Madina Tahuna	Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe	Penangkapan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya</li> <li>Selama triwulan I Tahun 2025 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan</li> </ol>	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limba yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan
-	-	-	-	-	-

Penjelasan warna:  TW I Tahun 2025  TW II Tahun 2025  TW III Tahun 2025  TW IV Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat 1 (satu) pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang diperiksa yakni KM. Madina Tahuna yang dilakukan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari yaitu dengan jenis kegiatan Unit Kapal Perikanan. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pada satu unit usaha kapal perikanan tersebut telah melaksanakan kegiatan operasional dengan patuh dan tidak terdapat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan operasional tersebut. Target pada Triwulan II Tahun 2025 tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha

dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 4  
Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam  
Pengelolaan Limbah Triwulan I Tahun 2025



## 2) Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan Yang Dilindungi

Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada *taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae* dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dengan rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 29. sebagai berikut.

Tabel 9. Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa  
Kepatuhan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
----	--------------	--------	--------------------	------------------	---------------

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Widiawati Lawendatu	Kampung Petta, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepl Sangihe	Penangkapan/ Pengambilan Ikan Bersirip ( <i>Pisces</i> ) yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam <i>Appendiks</i> CITES (03151)	1) Pelaku Usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha; 2) Pelaku Usaha telah memiliki SIPJI Perdagangan Dalam Negeri.	Kegiatan usaha dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam dokumen perizinan

Penjelasan warna:  TW I Tahun 2025  TW II Tahun 2025  TW III Tahun 2025  TW IV Tahun 2025

Pada tabel diatas realisasi pelaku usaha pemanfaatan ikan yang dilindungi, hingga akhir Triwulan II Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha atas nama Widiawati Lawendatu yang melakukan kegiatan pemanfaatan ikan yang dilindungi dengan kelompok jenis ikan Hiu dan Pari dimana dari kedua jenis ikan tersebut, terdapat beberapa spesies yang dilindungi. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pelaku usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha serta dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri. Target sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha dan telah memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

### 3) Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil difokuskan pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada komponen kepatuhan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut belum terdapat target dan capaian pada Triwulan I Tahun 2025. detail capaian dapat dilihat pada Tabel 10. sebagai berikut :

Tabel 10 Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan

Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan sampai dengan Triwulan II  
Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	-	-	-	-	-

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2025 ■ TW II Tahun 2025 ■ TW III Tahun 2025 ■ TW IV Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 telah terdapat 10 objek pelaku Usaha Pemanfaat Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya target yang ditentukan pada Triwulan I Tahun 2025

4) Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* didasarkan pada kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*, terdapat capaian dengan detail capaian dapat dilihat pada Tabel 11. sebagai berikut.

Tabel 11 Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhan Triwulan I Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Risto Mangadil	Kelurahan Iesa, Kec. Tahuna Timur. Kab. Kepl Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan hand line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
2	Jenerya Mamagi	Desa Sawang, Kec. Melongwane Barat, Kab. Kepl Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan hand Line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan

Penjelasan warna:  TW I Tahun 2025  TW II Tahun 2025  TW III Tahun 2025  TW IV Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, realisasi pengawasan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* Triwulan I Tahun 2025 berjumlah 2 (dua) pelaku usaha atas nama Risto Mangadil, dan Jenerya Mamagi. Dari 2 (dua) pelaku usaha tersebut, penggunaan alat tangkap Hand Line dengan hasil tangkapan antara lain ikan demersal dan ikan pelagis. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan indikasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Target hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2 (dua) pelaku usaha dengan capaian realisasi telah diperiksa sebesar 2 (dua) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

**Gambar 6**  
Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelarangan *Destructive Fishing* Triwulan I Tahun 2025



**SASARAN  
KEGIATAN 3****TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA  
PERIKANAN**

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan" pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

**ISK. 3***Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)*

ISK. 3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" ditetapkan sebagai IKU dengan target Nilai Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00 terdiri dari 6 (enam) detail sebagai berikut:

- Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single System*);
- Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT);
- Pengawasan importasi hasil perikanan;
- Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
- Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan (LKR);
- Pengawasan insidental.

Target Kinerja ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 12. berikut ini.

Tabel 12 Target Kinerja Komponen ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)"

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan	RKK 15 PU Ketaatan 100%	-	-	-	-

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan					
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan					
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan					

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 15 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Adapun capaian kinerja ISK.3 pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 13. sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" Triwulan II Tahun 2025

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2025		TW I 2026				TW I 2027				TW I 2028				TW I 2029				Persen	
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK					
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C				
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudi dayaan ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan	1	1	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW I 2025		TW I 2026				TW I 2027				TW I 2028				TW I 2029				Persen		
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK			ISK	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C		T	C
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Dari segi RKK, target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1 (satu) pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00%. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1 (satu) pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Adapun pelaku usaha yang diperiksa dengan objek penangkapan ikan terukur.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan terbaru, antara lain:
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan.
- Penerapan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan antara Dinas Perikanan Daerah Kepl. Sangihe dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayaperikanan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Komponen "Pengawasan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan" merupakan pemeriksaan Unit Pengolahan hasil perikanan pengawasan dilakukan melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko, serta kesesuaian terhadap kegiatan operasional perikanan yang dilaksanakan. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapatkan karena telah melengkapi tahapan yang telah dipersyaratkan dari Manual Indikator Kinerja (IKU), yaitu : 1). Tahapan Persiapan (10%) yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha dan Daftar Pertanyaan. 2). Tahapan Pemeriksaan (70%) yang terdiri dari Hasil Pengawasan dan Data Dukung. 3). Tahapan Pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP. Apabila setiap pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan

sebesar 100%. Sementara itu, Unit Pengolahan Hasil Perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 14. berikut ini.

Tabel 14 Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN PERORANGAN	KODE KBLI	SUBSEKTOR	HASIL PEMERIKSAAN	KEPATUHAN PELAKU USAHA
1.	PT. Jassendo Sentosa Mandiri	10213	Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen SKP telah berakhir masa berlaku pada tanggal 20 Januari 2025, sehingga diberikan Sanksi Administrasi berupa Teguran I dan himbauan kepada penanggungjawab kegiatan untuk dapat segera melengkapi dokumen tersebut	Tidak taat dan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran I

Penjelasan warna:      TW I Tahun 2025      TW II Tahun 2025      TW III Tahun 2025      TW IV Tahun 2025

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 2 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" dan Sasaran Kinerja 3 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2352 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 15. sebagai berikut.

Tabel 15 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" dan Sasaran Kerja 3 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real	Realisasi TW II Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
------	--	----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------------

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real	Realisasi TW II Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.2	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Rp. 124.747.000	Rp. 9.016.000	Rp. 0,-	-
ISK.2	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	Rp. 124.747.000	Rp. 9.016.000	Rp. 0,-	-
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rp. 150.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 1.050.000	7.00%
ISK.3	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	Rp. 150.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 1.050.000	7.00%

Penjelasan warna:  Sasaran Kerja  Indikator Sasaran Kinerja  Komponen

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.2 dan SK.3 Tahun 2025 sebesar Rp. 376.747.000,-. dengan pagu real sebesar Rp. 30.320.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi pagu real sebesar Rp. 2.850.000,- dengan persentase sebesar (9,40%).

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 2 dan 3 pada Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK. 2 dan 3 dan analisis terhadap realisasi anggaran sudah tercapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

### SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF



Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif" pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 105,72% berpredikat "Baik" dan diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) ISK, yaitu :



*Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)*

ISK. 1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2024 sebesar 91,00 Target Kinerja ISK.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Persentase 2,78%	Persentase 2,37%	Nilai Indeks 85,00	Nilai indeks 87,60	Nilai Indeks 91,00

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 2,78%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase 2,37%. Pada tahun 2022, dilakukan perubahan target dengan nilai indeks sebesar 85,00. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan target kembali dengan nilai indeks sebesar 87,60. Kemudian pada tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target

nilai indeks sebesar 91,00.

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2024, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 5. berikut ini.

Tabel 5 Hasil Capaian ISK.1 “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”  
Triwulan II Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020 (Persentase)		TW II 2021 (Persentase)		TW II 2022 (Nilai Indeks)		TW II 2023 (Nilai Indeks)		TW II 2024 (Nilai Indeks)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks kinerja operasi kapal pengawas	0,48 %	0,48 %	0,83 %	1,17 %	87,50	92,60	87,60	100,00	91,00	91,01	100,01 %

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024 dengan nilai 91,00 telah tercapai dengan nilai 91,01. Pencapaian pada Triwulan II dengan nilai 91,01 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,01% berpredikat “Baik”. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut hanya bisa dibandingkan dengan capaian pada triwulan II pada tahun 2022 dan 2023. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan dari waktu jenis target antara persentase dan nilai indeks. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan 2023 nilai capaian tersebut dapat dikategorikan tercapai dengan baik, walaupun secara persentase pada aplikasi *Kinerjaku* mengalami penurunan, akan tetapi dapat diindikasikan tercapai dengan baik dikarenakan memenuhi nilai target yang telah ditentukan.

Adapun nilai Triwulan II Tahun 2023 didapat dari perhitungan pada Tabel 6. di bawah ini.

Tabel 6 Perhitungan “Indeks Kinerja Kapal Pengawas” Triwulan II Tahun 2024

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
KP. Hiu 15	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	57	57,72	31,09	91,01
			Realisasi	47			
		Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	3	20,00		
			Realisasi	2			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,34	39,92	39,92	
			Realisasi	0,34			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	30	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (30%)	Target	0	30		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				

Berdasarkan tabel diatas, nilai "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" Triwulan II Tahun 2024 didapat dari Kapal Pengawas Hiu 15 sebesar 91,01. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) variabel pembentuk antara lain :

1. Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan (40%) dengan nilai 40, terdiri dari:

- a. Pemeriksaan kapal perikanan (70%) dari target 57 kapal diperiksa dan realisasi 47 kapal diperiksa dengan nilai 57,72;
  - b. Pemeriksaan kelautan (30%) dari target 3 objek pengawasan kelautan dan realisasi 2 objek pengawasan kelautan dengan nilai 20,00.
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (40%) dari target 0,34 dan realiasi 0,34 dengan nilai 40.
  3. Tindak lanjut target operasi (15%) dengan nilai 15, terdiri dari:
    - a. Intercept indikasi pelanggaran (60%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60;
    - b. Dukungan kegiatan SAR (40%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60.
  4. Dukungan operasi lainnya (5%) dengan nilai 5, terdiri dari:
    - a. Penyitaan alat tangkap terlarang (30%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 30;
    - b. Pemutusan rumpon ilegal (30%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 30;
    - c. Dukungan operasi bersama (40%) belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.

Tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut yang menjadi faktor keberhasilan dalam pemenuhan indikator kinerja, dengan variabel cakupan wilayah pengawasan yang mencapai target dan jumlah riksa kapal serta pemeriksaan wilayah kelautan yang mendapatkan nilai cukup yang dapat menentukan faktor keberhasilan dari nilai indikator kinerja tersebut.

Gambar 4  
Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Triwulan II Tahun 2024





### *Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)*

ISK.2 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2024 sebesar 91,00. Target Kinerja ISK.2 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini.

Tabel 7 Target ISK.2 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawasan

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Persentase 0,07%	Persentase 0,07%	Nilai Indeks 87,50	Nilai indeks 87,60	Nilai Indeks 91

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 0,07%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase 0,07%. Pada Tahun 2022, dilakukan perubahan target dengan nilai indeks sebesar 87,50. Pada Tahun 2023, dilakukan perubahan target kembali dengan nilai indeks sebesar 87,60. Kemudian pada Tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan, ditetapkan target nilai indeks sebesar 91.

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2024, dilakukan pengukuran realisasi

berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 8.** berikut ini.

Tabel 8 Hasil Capaian ISK.2 “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” Triwulan II Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020 (Persentase)		TW II 2021 (Persentase)		TW II 2022 (Nilai Indeks)		TW II 2023 (Nilai Indeks)		TW II 2024 (Nilai Indeks)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	87,50	60,83	87,60	97,67	91,00	113,42	120,00%

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024 dengan nilai 91,00 telah tercapai dengan nilai 113,42 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 120,00% berpredikat “Istimewa”. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut hanya bisa dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2022 dan 2023. Untuk tahun 2020 dan 2021, capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan dari waktu jenis target antara persentase dan nilai indeks. Dari segi persentase, sejak tahun 2020 hingga 2024, pada setiap Triwulan II mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun nilai Triwulan II Tahun 2024 didapat dari perhitungan pada Tabel 9. di bawah ini.

Tabel 9 Perhitungan “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” Triwulan II Tahun 2024

Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
SP. Napoleon 17	Jumlah Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	15	63,30	55,33	110,44
			Realisasi	19			
	Pemeriksaan Kelautan (40%)	Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	2	75,00		
			Realisasi	3			

Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,000015	-	35.1	
			Realisasi	0,000013			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
		Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20		
			Realisasi	0			
SP. Napoleon 39	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal	Target	10	65,00	46,00	
			Realisasi	13			
		Pemeriksaan Perikanan (50%)	Target	2	50,00		
			Realisasi	2			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,000010	-	50,40	
			Realisasi	0,000013			
	Tindak Lanjut Target Operasi (60%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			

Speedboat Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target/ Realisasi	Nilai Target/ Realisasi	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks Kinerja per Unit
	(15%)	Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5	
				Realisasi			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
				Realisasi			
	Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20			
			Realisasi		0		
Nilai Indeks Kinerja							113,42

Berdasarkan tabel di atas, "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" Triwulan II Tahun 2024 didapat dari Speedboat Pengawas Napoleon 017 dan Napoleon 039 sebesar 113,42. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) variabel pembentuk antara lain :

1. Jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan (40%) dengan nilai Napoleon 017 sebesar 40 dan Napoleon 039 sebesar 40, terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan kapal perikanan (50%)
    - Napoleon 17 dari target 15 kapal diperiksa dan realisasi 19 kapal diperiksa dengan nilai 63,30.
    - Napoleon 39 dari target 10 kapal diperiksa dan realisasi 13 kapal diperiksa dengan nilai 65,00.
  - b. Pemeriksaan Kelautan (50%)
    - Napoleon 17 dari target 2 pemeriksaan kelautan dan realisasi 3 pemeriksaan kelautan dengan nilai 75,00;

- Napoleon 39 dari target 2 pemeriksaan kelautan dan realisasi 2 pemeriksaan kelautan dengan nilai 50,00;
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (40%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 40 dan Napoleon 39 sebesar 40, terdiri dari :
    - Napoleon 17 dari target 0,000015 dan realisasi 0,000013 dengan nilai 35,10.
    - Napoleon 39 dari target 0,000010 dan realisasi 0,000013 dengan nilai 50,40.
  3. Tindak lanjut terget operasi (15%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 15 dan Napoleon 39 sebesar 15, terdiri dari :
    - a. Intercept indikasi pelanggaran (60%)
      - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60;
      - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 60.
    - b. Dukungan kegiatan SAR (40%)
      - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40;
      - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.
  4. Dukungan operasi lainnya (5%) dengan nilai Napoleon 17 sebesar 5 dan Napoleon 39 sebesar 5, terdiri dari :
    - a. Penyitaan alat tangkap terlarang (40)
      - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40;
      - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.
    - b. Pemutusan rumpon ilegal (40%)
      - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40;
      - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 40.
    - c. Dukungan operasi bersama (20%) tidak memiliki target dan realisasi dengan nilai 40.
      - Napoleon 17 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 20;
      - Napoleon 39 belum terdapat target dan realisasi dengan nilai 20.

Tercapainya target dari variabel pembentuk tersebut yang menjadi faktor

keberhasilan dalam pemenuhan indikator kinerja, dengan variabel jumlah kapal yang diperiksa dan pemeriksaan kelautan yang mencapai target.

Pada tahun 2024 yang merupakan akhir periode Renstra, terdapat target pada ISK "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas" dengan nilai indeks 91,00 dan diharapkan terget tersebut dapat tercapai.

Gambar 5  
Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Triwulan II Tahun 2024



*"Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas"*

"Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada Tahun 2024 sebesar 100,00%. Target Kinerja "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel 10. berikut ini.

Tabel 10 Target ISK.3 "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	Nilai Indeks 90,00	Persentase 100,%	Persentase 100%

Pada tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra tidak terdapat target. Pada Tahun 2022, dikarenakan "Persentase pemenuhan logistik kapal

pengawas” merupakan indikator baru, maka diberikan target dengan nilai indeks sebesar 90,00. Pada Tahun 2023 ditetapkan target nilai persentase sebesar 100,00%. Kemudian pada tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan ditetapkan target dengan persentase 100,00%.

Pada Triwulan II Tahun 2024, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun perbandingan capaian dengan triwulan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 11. berikut ini.

Tabel 11 Hasil Capaian ISK.3 “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas” Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024 (Tahun Berjalan)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2024 dengan persentase 100,00% telah tercapai dengan persentase 100,00% dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat “Baik”. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya ISK tersebut tidak dapat dibandingkan karena pada Triwulan yang sama di tahun sebelumnya tidak ada target dan tidak dilakukan pengukuran pada ISK tersebut. Indikator keberhasilan “Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas” berdasarkan terlaksananya 5 (lima) kriteria penilaian sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) terlaksana (bulanan) dibuktikan dengan Berita Acara penggunaan BBM akhir bulan;
- Pemenuhan kebutuhan pelumas terlaksana (bulanan) dibuktikan dengan Berita Acara penggunaan pelumas akhir bulan;

- Pemenuhan kebutuhan bahan makanan terlaksana (bulanan) dibuktikan dengan daftar usulan kebutuhan bahan makanan setiap bulan;
- Pemenuhan kebutuhan air tawar terlaksana (bulanan) dibuktikan dengan daftar pembelian air tawar setiap bulan;
- Pemenuhan kebutuhan alat-alat pelayanan terlaksana (bulanan) dibuktikan dengan daftar usulan kebutuhan alat tulis kantor, *computer supply* dan kebutuhan sehari-hari setiap bulan;
- Pemenuhan senjata api (bulanan) dibuktikan dengan laporan pemakaian peluru akhir bulan.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 1. "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2350.QHD dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada Tabel 12. sebagai berikut.

Tabel 12 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1. "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif"

Kode	Kode MAK	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
SK.1	2350.QHD	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	5.460.363.000	2.283.303.676	41.82%
ISK.1	2350.QHD.001	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	4.966.203.000	2.138.503.676	43.06%
ISK.3		Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas			
ISK.2	2350.QHD.003	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	494.160.000	144.800.000	29.30%

Penjelasan warna:      Sasaran Kerja      Indikator Sasaran Kinerja      Variabel Pembentuk

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.1 Tahun 2024 sebesar Rp. 5.460.363.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 2.283.303.676,- (41.82%). Dengan rincian untuk ISK.1 dan ISK.3 menggunakan kode 2350.QHD.001 telah terealisasi sebesar Rp. 2.138.503.676,- dari alokasi anggaran Rp. 4.966.203.000,-

dengan persentase 43.06%; dan ISK.2 telah terealisasi Rp. 144.800.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 494.160.000,- dengan persentase 29.30%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.1 dan analisis terhadap realisasi anggaran, hingga akhir Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan cukup efisien dikarenakan target capaian terlaksana dengan baik dan serapan anggaran yang sesuai dengan target.

**SASARAN KEGIATAN 2** TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan” Triwulan II Tahun 2024 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :

**ISK. 4** *Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (%)*

ISK.4 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan” ditetapkan sebagai IKU, dengan target persentase pada Tahun 2024 sebesar 100%. Target Kinerja ISK.4 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan” berdasarkan Renstra, adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 13. berikut ini.

Tabel 13 Target ISK.4 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Persentase Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan	Persentase 100%	Persentase 100%	Persentase 100%	Persentase 100%	Persentase 100%

Pada Tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat target persentase sebesar 100,00%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan target persentase 100,00%. Pada Tahun 2022, ditentukan target persentase sebesar 100,00%. Pada Tahun 2023 juga ditetapkan target persentase sebesar 100,00%. Kemudian pada Tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan ditetapkan kembali target persentase sebesar 100%.

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2024, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 14. berikut ini.

Tabel 14 Hasil Capaian ISK.4 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” Triwulan II Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020 (Persentase)		TW II 2021 (Persentase)		TW II 2022 (Persentase)		TW II 2023 (Persentase)		TW II 2024 (Persentase)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.4 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.



*Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)*

ISK.5 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” ditetapkan sebagai IKU, dengan target persentase pada Tahun 2024 sebesar 100%. Target Kinerja ISK.5 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan” berdasarkan Renstra, adapun informasi dapat dilihat pada Tabel

15. berikut ini.

Tabel 15 Target ISK.5 “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-	-	Persentase 100%

Pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak terdapat IKU “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Saran Pengawasan SDKP”. Sementara itu pada tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan dan akhir periode Renstra, ditetapkan target dengan Persentase sebesar 100%. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2024, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 16. berikut ini.

Tabel 16 Hasil Capaian ISK.5 “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” Triwulan II Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020 (Persentase)		TW II 2021 (Persentase)		TW II 2022 (Persentase)		TW II 2023 (Persentase)		TW II 2024 (Persentase)		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.5 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran

Kinerja 2. "Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2350 CBQ & RCG dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada Tabel 17. sebagai berikut.

Tabel 17 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2. "Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP yang Sesuai Ketentuan"

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
SK.2	2350.RCG + 2350 CBQ	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	Rp. 3.013.867.000	Rp. 754.148.479	25%
ISK.4	2350.CBQ.001	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan	Rp. 850.817.000	Rp. 252.045.900	29,62%
ISK.5	2350.RCG.001	Persentase Pemeliharaan Perawatan Sarana pengawasan SDKP	RP. 2.163.050.000	Rp. 502.102.579	23.21%

Penjelasan warna:   Sasaran Kerja   Indikator Sasaran Kinerja   Variabel Pembentuk

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.2 Tahun 2024 sebesar Rp. 3.013.867.000,-. Berdasarkan perhitungan hingga akhir Triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 754.148.479,- (25%). Dengan rincian untuk ISK.4 dari alokasi anggaran Rp. 850.817.000 telah terealisasi sebesar 252.045.900,- dengan persentase (29,62%),-. Sementara itu untuk ISK.5 telah terealisasi Rp. 502.102.579,- dari alokasi anggaran Rp. 2.163.050.000,- dengan persentase 23.21%.

**SASARAN KEGIATAN 3**

TERSELENGGARANYA PENGAWASAN PELAKU USAHA DAN PEMANFAAT SUMBER DAYA KELAUTAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan" pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100,00 berpredikat "Baik" dan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :

ISK. 6

*Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)*

ISK.6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada Tahun 2024 sebesar 100,00%, dimana memiliki 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah;
- Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi;
- Kepatuhan pelaku usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut;
- Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Persentase perhitungan nilai terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: Tahapan persiapan (10%) yang dibuktikan dengan SPT, Surat pemberitahuan dan daftar pertanyaan; Tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan Usaha dengan peraturan perundang-undangan (70%) yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan dan Formulir pemeriksaan SDK; serta Tahapan pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila kegiatan pengawasan sumber daya kelautan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%.

Target Kinerja ISK.6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 18. berikut ini.

Tabel 18 Target Kinerja Komponen ISK.6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun berjalan)
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	-	-	-	RKK 1 PU Ketaatan 100%	20 PU Ketaatan 100%
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	-	-	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 1 PU Ketaatan 100%	2 PU Ketaatan 100%
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	-	-	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 1 PU Ketaatan 100%	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	RKK 3 PU	RKK 15 PU Ketaatan 100%	RKK 20 PU Ketaatan 100%	RKK 20 PU Ketaatan 100%	25 PU Ketaatan 100%

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 3 pelaku usaha. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan total target 15 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2022, ditentukan target 22 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2023 ditentukan target 23 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Sementara itu pada tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan, ditentukan target sebesar 47 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Adapun capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 pada ISK.6 dapat dilihat pada Tabel 19. sebagai berikut :

Tabel 19 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.6 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan" Triwulan II Tahun 2024

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022				TW II 2023				TW II 2024				
	RKK		RKK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020		TW II 2021				TW II 2022				TW II 2023				TW II 2024			
	RKK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	-	-	1 PU	1 PU	50 %	100 %	-	-	-	-	1 PU	1 PU	100 %	100 %	6 PU	6 PU	100 %	100 %
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 PU	1 PU	100 %	100 %	1 PU	1 PU	100 %	100 %
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	-	-	-	-	-	-	1 PU	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	-	-	5 PU	5 PU	50 %	100 %	3 PU	3 PU	20 %	100 %	7 PU	7 PU	100 %	100 %	6 PU	9 PU	100 %	100 %

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Berdasarkan target kinerja Triwulan II Tahun 2024, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian kinerja pada ISK.6 sebesar 100,00%. Dari pencapaian kinerja keempat komponen ISK tersebut, maka pada akhir Triwulan II Tahun 2024 Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai capaian kinerja pada SK.3 di aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik".

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, telah didapatkan capaian kinerja yang stabil pada setiap komponen ISK.6. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada akhir Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai target jumlah pengawasan pelaku usaha kelautan yang ditentukan. Dari segi

ketaatan, telah tercapai sesuai dengan dipersyaratkan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan kelautan terbaru, antara lain:
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
  - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayakelautan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja dari keempat komponen tersebut sebagai berikut:

2) Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah

Pengawasan pencemaran perairan didasarkan kepada kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2024, terdapat target serta capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah, rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 20. sebagai berikut.

Tabel 20 Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam

Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan II Tahun  
2024

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	KM. Madina Tahuna	Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe	Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya</li> <li>Selama triwulan II Tahun 2024 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan</li> </ol>	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limba yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan
2	PT. Berkat Mina Bahari	Kec. Gemenh Kab. Kepl Talaud	Unit Pengolahan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki dokumen NIB;</li> <li>Telah memiliki Ketersediaan Fasilitas Pencegahan Pencemaran</li> </ol>	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan perizinan lingkungan
3	KM. Avshaloom	Desa Dalam Kec. Salibabu Kab. Kepl Sangihe	Unit Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki dokumen NIB;</li> <li>Telah memiliki dokumen SIPI;</li> <li>Telah memiliki dokumen SIUP;</li> <li>Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik</li> </ol>	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limba yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
				<p>maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya</p> <p>5. Selama triwulan II Tahun 2024 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan</p>	kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan
4	KM. Madina Tahuna	Kec. Tidore Kel. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe	Unit Kapal Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah memiliki dokumen NIB;</li> <li>2. Telah memiliki dokumen SIPI;</li> <li>3. Telah memiliki dokumen SIUP;</li> <li>4. Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya</li> <li>5. Selama triwulan II Tahun 2024 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan</li> </ol>	<p>Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan</p>

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
5	KM. Chartenz	Desa Mala, Kab. Kepl. Talaud	Unit Kapal Perikanan	1) Pada kapal perikanan telah disediakan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya 2) Selama triwulan II Tahun 2024 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan	Kegiatan usaha dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limbah yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2024 ■ TW II Tahun 2024 ■ TW III Tahun 2024 ■ TW IV Tahun 2024

Pada Triwulan II Tahun 2024, terdapat 5 (Lima) pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang diperiksa yakni PT. Berkat Mina Bahari yang dilakukan pengawasan pada bulan Mei yaitu dengan jenis kegiatan Unit Pengolahan Ikan. KM. Madina Tahuna yang dilakukan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan April dan Mei dengan jenis kegiatan Penangkapan Ikan. KM. Avshaloom dengan jenis kegiatan penangkapan Ikan. Serta KM. Chartenz dengan jenis kegiatan penangkapan ikan. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pada 1 (satu) unit pengolahan ikan (UPI), dan 4 (empat) Kapal penangkapan ikan, telah melaksanakan kegiatan operasional dengan patuh dan tidak terdapat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan operasional tersebut. Target pada Triwulan II Tahun 2024 tercapai dengan terperiksanya 5 (lima) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 6  
Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam  
Pengelolaan Limbah Triwulan II Tahun 2024



### 3) Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan Yang Dilindungi

Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada *taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae* dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, akuaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pada Triwulan II Tahun 2024, tidak terdapat capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha

pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dikarenakan akan dilakukan pengawasn pada Triwulan selanjutnya. Adapun rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 21. sebagai berikut.

Tabel 21 Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhan nya Triwulan II Tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
-	-	-	-	-	-

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2024 ■ TW II Tahun 2024 ■ TW III Tahun 2024 ■ TW IV Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada capaian untuk realisasi pelaku usaha pemanfaatan ikan yang dilindungi, hingga akhir Triwulan II Tahun 2024, dikarenakan pengawasan akan dilakukan pada periode triwulan selanjutnya, yaitu pada periode Triwulan III Tahun 2024.

3) Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil difokuskan pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada komponen kepatuhan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut belum terdapat target dan capaian pada Triwulan I Tahun 2024. detail capaian dapat dilihat pada Tabel 22. sebagai berikut :

Tabel 22 Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan nya Triwulan II Tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
-	-	-	-	-	-

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2024 ■ TW II Tahun 2024 ■ TW III Tahun 2024 ■ TW IV Tahun 2024

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, hingga akhir Triwulan II Tahun 2024 belum terdapat realisasi pelaku Usaha Pemanfaatan Pesisir, Pulau-Pulau

Kecil dan Ruang Laut yang diperiksa. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya target yang ditentukan pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna pada Tahun 2024

4) Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* didasarkan pada kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*, terdapat capaian dengan detail capaian dapat dilihat pada Tabel 23. sebagai berikut.

Tabel 23 Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhanannya Triwulan II Tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Sutrisno Budiman	Desa Sambuara Utara Kec. Essang Selatan Kab. Kepl. Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan hand line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
2	Isak Saweduling	Desa Enseme Kec. Essang Selatan Kab. Kepl Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan hand Line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
3	Henok Hanibe	Kampung Barangka, Kec. Manganitu, Kab. Kepl Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan Hand Line. Hasil tangkapan ikan demersal	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
4	Nursalang Limpong	Kampung Bahoi, Kec. Manganitu Kab. Kepl Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan Hand Line. Hasil tangkapan ikan demersal	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
5	Rio Mangansung	Kelurahan Kolongan Mitung, Kec. Tahuna Barat Kab. Kepl Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan Hand Line. Hasil tangkapan ikan demersal	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
6	Yance Makawewe	Kelurahan Kolongan Akembawi Kec. Tahuna Barat Kab. Kepl. Sangihe	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan Hand Line. Hasil tangkapan ikan demersal	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
7	Fiter A. Tamawiwi	Desa Maririk, Kec. Essang Kab. Kepl Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive fishing</i> . Alat tangkap yang digunakan Hand Line	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan

Penjelasan warna: ■ TW I Tahun 2024 ■ TW II Tahun 2024 ■ TW III Tahun 2024 ■ TW IV Tahun 2024

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, realisasi pengawasan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* Triwulan II Tahun 2024 berjumlah 7 (Tujuh) pelaku usaha atas nama Sutrisno Budiman, Isak Saweduling , Henok Hanibe, Nursalang Limpong, Rio Mangansung, Yance Makawewe, Fiter A. Tamawiwi. Dari 7 (Tujuh) pelaku usaha tersebut, penggunaan alat tangkap Hand Line dengan hasil tangkapan antara lain ikan demersal dan ikan pelagis. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan indikasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Target hingga akhir Triwulan II Tahun 2024 sebesar 7 (Tujuh) pelaku usaha dengan capaian realisasi telah diperiksa sebesar 7 (Tujuh) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

**Gambar 7**  
**Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap**  
**Ketentuan Pelarangan *Destructive Fishing* Triwulan II Tahun 2024**



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 3. "Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2352 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 24. sebagai berikut.

**Tabel 24 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3. "Terselenggaranya**  
**Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan"**

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	Rp. 289.000.000	Rp. 95.693.480	33.11%
ISK 2.1.1	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber daya Kelautan	Rp. 289.000.000	Rp. 95.693.480	33.11%
	Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah	Rp. 56.000.000	Rp. 7.800.000	13.93%
	Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	Rp. 150.000.000	Rp. 75.320.270	50.21%
	Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	Rp. 83.000.000	Rp. 12.573.210	15.15%

Penjelasan warna:   Sasaran Kerja   Indikator Sasaran Kinerja  Komponen

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.3 Tahun 2024 sebesar Rp. 289.000.000,-. Pada akhir Triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 95.693.480,- (33.11%). Dengan rincian untuk komponen "kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah", telah terealisasi Rp. 7.800.000,- dari alokasi anggaran Rp. 56.000.000,- dengan persentase (13,93%). Komponen "kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi" telah terealisasi Rp. 75.320.270,- dari alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dengan persentase (50,21%) dan komponen "kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*" telah terealisasi Rp. 12.573.210,- dari alokasi anggaran Rp. 83.000.000,- dengan persentase (15,15)%.

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 3 hingga akhir Triwulan II Tahun 2024. Sementara itu untuk alokasi dan realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

#### SASARAN KEGIATAN 4

TERSELENGGARANYA PENGAWASAN PELAKU USAHA DAN  
PEMANFAAT SUMBER DAYA PERIKANAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan" pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

#### ISK. 7

*Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan*

ISK. 7 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target Nilai Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100, terdiri dari 6 (enam) detail sebagai

berikut:

- Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single System*);
- Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT);
- Pengawasan importasi hasil perikanan;
- Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
- Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan (LKR);
- Pengawasan insidental.

Target Kinerja ISK.7 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 25. berikut ini.

Tabel 25 Target Kinerja Komponen ISK.7 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan	RKK 30 PU Ketaatan 100%	RKK 30 PU Ketaatan 100%	RKK 30 PU Ketaatan 100%	RKK 10 PU Ketaatan 100%	RKK 15 PU Ketaatan 100%
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 23 PU Ketaatan 100%	RKK 17 PU Ketaatan 100%		
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan	RKK 14 PU Ketaatan 100%	RKK 17 PU Ketaatan 100%	RKK 18 PU Ketaatan 100%		
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan	RKK 1 PU Ketaatan 100%	RKK 5 PU Ketaatan 100%	RKK 1 PU Ketaatan 100%		

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2020, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 46 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Kemudian dilakukan review Renstra terakhir pada tahun 2021 dengan total target 75 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2022, ditentukan target 66 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Pada tahun 2023 ditentukan target sebesar 10 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Sementara itu untuk tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan, ditentukan target 15 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%.

Adapun capaian kinerja ISK.7 pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 26. sebagai berikut:

Tabel 26 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.7 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan" Triwulan II Tahun 2024

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020		TW II 2021				TW II 2022				TW II 2023				TW II 2024				Persen Persen			
	RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK		RKK		ISK							
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C						
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan	17	17	100	100	23	32	100	100	30	30	100	100										
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudi dayaan ikan	8	8	100	100	12	12	100	100	-	-	-	-										
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan	1	1	100	100	9	11	100	100	8	8	100	100	8	8	100	100	3	3	100	100		
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan	-	-	-	-	5	6	100	100	-	1	100	100										
													8	8	100	100	3	3	100	100		100%

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Dari segi RKK, target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 3 pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00%. Realisasi Triwulan II Tahun 2024 sebesar 3 pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Adapun dari 3 pelaku usaha yang diperiksa termasuk dalam pemeriksaan penangkapan ikan terukur.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya, telah didapatkan capaian kinerja yang stabil pada setiap komponen ISK.7. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan II Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan terbaru, antara lain:
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
  - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.
- Penerapan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan antara Dinas Perikanan Daerah Kepl. Sangihe dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta

Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayaperikanan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja ISK.7 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

## 2. Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Komponen “Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT)” merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan terukur. Pada Triwulan II Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%. Persentase ini didapat karena telah melengkapi tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: 1) Tahapan Persiapan (15%) yang terdiri dari Surat Perintah Tugas; 2) Tahapan Pemeriksaan (70%) yang terdiri dari HPK Keberangkatan dan SLO untuk pemeriksaan keberangkatan serta HPK Kedatangan untuk pemeriksaan kedatangan; serta 3) Tahapan Pelaporan (15%) yang terdiri dari Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP. Apabila pemeriksaan setiap kapal perikanan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%. Sementara itu, kapal perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 27. berikut ini.

Tabel 27 Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Lingkup Stasiun PSDKP Tahun Triwulan II Tahun 2024

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	GT	HASIL PEMERIKSAAN	LAIK / TIDAK LAIK
1	Marcopolo Star	03111	35	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi
2	Lahai Roy	03111	24	Dokumen perizinan	Laik Operasi

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	GT	HASIL PEMERIKSAAN	LAIK / TIDAK LAIK
				lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	
3	Taufik Tahuna	03111	22	Dokumen perizinan lengkap dan masih berlaku. Hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sesuai dengan dokumen	Laik Operasi

Penjelasan warna:  TW I Tahun 2024  TW II Tahun 2024  TW III Tahun 2024  TW IV Tahun 2024

Setiap unit kapal tersebut telah diperiksa kelaikannya dan dinyatakan laik operasi. Pengawasan kapal perikanan tersebut dilakukan oleh pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna. Selain kegiatan pemeriksaan kapal perikanan, juga dilakukan kegiatan lain yang mendukung pencapaian IKU meliputi pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Untuk kapal perikanan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha dapat dilihat pada Tabel 28. berikut ini.

Tabel 28 Dokumen Nomor Perizinan Berusaha Kapal Perikanan dalam Penangkapan Ikan Terukur yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan II Tahun 2024

NO	NAMA KAPAL	KODE KBLI	NOMOR PERIZINAN BERUSAHA	INSTANSI PENERBIT
1	KM. Marcopolo Star	03111	33.23.0001.107.52103	Ditjen Perikanan Tangkap
2	KM. Lahai Roy	03111	33.24.0001.107.58214	Ditjen Perikanan Tangkap
3	KM. Taufik Tahuna	03111	33.24.0001.107.59588	Ditjen Perikanan Tangkap

Dari 3 (tiga) kapal perikanan yang dilakukan pengawasan, seluruhnya telah memiliki nomor perizinan berusaha baik kegiatan kapal penangkap ikan maupun kegiatan kapal pengangkut ikan.

Gambar 8  
Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Triwulan II Tahun 2024



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 4. "Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2353 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 29. sebagai berikut.

Tabel 29 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 4. "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
SK.4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Rp. 272.000.000	Rp. 92.077.365	33.85%
ISK.7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	Rp. 272.000.000	Rp. 92.077.365	33.85%

Penjelasan warna:      Sasaran Kerja      Indikator Sasaran Kinerja  Komponen

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.4 Tahun 2024 sebesar Rp. 272.000.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 92.077.365,- (33.85%).

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 4. pada Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.4 dan analisis terhadap realisasi anggaran sudah tercapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

**SASARAN KEGIATAN 5** TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG TUNTAS

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas” pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% berpredikat “Baik” dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

**ISK.8** “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan Perikanan”

ISK.8 “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” ditetapkan sebagai IKU dengan target Indeks pada tahun 2024 sebesar 80. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 30. berikut ini.

Tabel 30  
Target ISK.8 “Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP	-	-	80,00%	80,00%	80,00

Tahuna					
--------	--	--	--	--	--

Pada tahun 2020 s/d tahun 2021 tidak terdapat target yang ditentukan. Pada tahun 2022 terdapat target persentase sebesar 80,00%. Pada tahun 2023 ditetapkan target persentase sebesar 80,00%. Sedangkan pada tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan ditetapkan target dengan nilai Indeks 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 31. berikut ini.

**Tabel 31**  
**Hasil Capaian ISK.8 “Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” Triwulan II Tahun 2024**

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020 (Persentase)		TW II 2021 (Persentase)		TW II 2022 (Persentase)		TW II 2023 (Persentase)		TW II 2024 (Nilai Indeks)		Nilai Indeks
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	40,00	100,00	60,00	60,00	100,00

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat target nilai Indeks sebesar 60 dan capaian kinerja sebesar 60. dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat “Baik”. ISK.8 “Indeks pengenaan sanki administratif bidang kelautan dan perikanan” dinyatakan tercapai dikarenakan belum adanya kasus pengenaan sanksi administratif yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK.8 “Indeks pengenaan sanki administratif bidang kelautan dan perikanan” hanya dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2020 s/d tahun 2022 tidak terdapat target maupun capaian pada ISK tersebut. Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat target dengan persentase 40%. Sementara itu untuk Triwulan II Tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan terdapat target dengan nilai Indeks sebesar 60.



*"Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"*

"Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai indeks pada tahun 2024 sebesar 80 Target Kinerja "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel 32. berikut ini.

Tabel 32  
Target ISK.9 "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2020	Target 2021 (Review Renstra terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	Nilai Indeks 80	Nilai Indeks 80

Pada tahun 2020 s/d tahun 2022 tidak terdapat target yang ditentukan. Pada Tahun 2023, dikarenakan "Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan" merupakan indikator baru, maka diberikan target nilai indeks sebesar 80,00. Sementara itu pada Tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan dan akhir periode Renstra, ditetapkan target dengan Nilai Indeks sebesar 80.

Adapun perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 33. berikut ini.

Tabel 33  
 Hasil Capaian ISK. 9 "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan  
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" Triwulan II Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target dan capaian pada IKS.9 "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" pada Triwulan II Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.9 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan dan akhir periode Renstra, terdapat target dengan nilai Indeks 80,00.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 5 "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Tuntas" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2351 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 34. sebagai berikut.

Tabel 34  
 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3.1 "Terselenggaranya  
 Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan  
 Perikanan Sesuai Ketentuan"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Tuntas	Rp. 156.500.000	Rp. 64.162.392	37.64%
ISK.8	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan	Rp. 156.500.000	Rp. 64.162.392	37.64%

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
	Perikanan			
ISK.9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			

Penjelasan warna:   Sasaran Kerja   Indikator Sasaran Kinerja   Komponen

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.5 Tahun 2024 sebesar Rp.156.500.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 64.162.392.- dari alokasi anggaran Rp.156.500.000 dengan persentase sebesar 37.64%.

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 5 pada Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.5 dan analisis terhadap realisasi anggaran sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

#### SASARAN KEGIATAN 6

TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas" pada Tahun 2024 sebesar 93,00 dengan diidentifikasi ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:

ISK.10

*" Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"*

ISK.10 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai Indeks pada tahun 2024 sebesar 93,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 35. berikut ini.

**Tabel 35**  
Target ISK.10 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2020	Target 2021 (Review Renstra Terakhir)	Target 2022	Target 2023	Target 2024 (Tahun Berjalan)
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	100,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00 Nilai Indeks

Pada Tahun 2020 yang merupakan periode awal Renstra, ditetapkan target persentase sebesar 100,00%. Pada Tahun 2021 dilakukan review Renstra dengan target persentase berubah menjadi 93,00%. Pada Tahun 2022 ditentukan target persentase sebesar 93,00%. Pada Tahun 2023 ditentukan target dengan persentase sebesar 93,00%. Pada Tahun 2024 yang merupakan tahun berjalan dan akhir dari periode Renstra, ditentukan target nilai Indeks sebesar 93,00.

Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 36. berikut ini.

**Tabel 36**  
Hasil Capaian ISK.10 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” Triwulan II Tahun 2024

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2020		TW II 2021		TW II 2022		TW II 2023		TW II 2024		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna	2 kasus	-	50,00 %	68,00 %	40,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00	100,00	120,00 %

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan nilai Indeks sebesar 100,00 dari target yang telah ditentukan sebesar 50,00 dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 120,00% berpredikat “Istimewa”. Angka capaian tersebut didapat berdasarkan

perhitungan pada Manual IKU yang menjelaskan apabila proses penyidikan telah mencapai tahap P21 maka nilai capaian dapat dihitung 100% tercapai. Dikarenakan proses penyidikan yang sedang ditangani oleh Stasiun PSDKP Tahuna sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 telah menyelesaikan penyidikan sampai dengan tahap P21 sebanyak 4 Kasus, maka nilai capaian dapat dihitung tercapai dengan nilai 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, capaian belum dapat dibandingkan, dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada capaian yang diperoleh. Pada triwulan II tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menggunakan indikator persentase dalam penentuan target dan capaian. Sementara itu untuk Triwulan II Tahun 2024 Indikator pengukuran target dan capaian menggunakan indikator nilai Indeks.

Gambar 9

Penandatanganan Berkas Perkara P21 dengan Kejaksaan Negeri Kepl Sangihe



Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 6. "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2351.BCE.U04 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat

pada Tabel 37. sebagai berikut :

Tabel 37  
Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 6. "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.6	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	Rp. 204.000.000	Rp. 71.520.700	35.06%
ISK.10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Rp. 204.000.000	Rp. 71.520.700	35.06%

Penjelasan warna:  Sasaran Kerja  Indikator Sasaran Kinerja

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.6 Tahun 2025 sebesar Rp. 204.000.000,-. Berdasarkan perhitungan realisasi sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 71.520.700,- (35.06%). Dengan rincian untuk ISK.10 telah terealisasi Rp 71.520.700,- dari alokasi anggaran Rp. 204.000.000,- dengan persentase 35.06%.

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 6 pada Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.6 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan cukup efisien dikarenakan target capaian terlaksana dengan baik dan serapan anggaran yang sesuai dengan target.



TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF,  
LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 107,80% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasi ke dalam 11 (Sebelas) ISK, yaitu:

**ISK.9**

*" Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna "*

ISK.9 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 71,50. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 30. berikut ini.

Tabel 30  
Target ISK.9 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	71,50 (Nilai)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.9 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) " pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 71,50. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 31**. berikut ini.

Tabel 31  
Hasil Capaian ISK.9 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun

capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.9 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari capaian komponen kinerja, penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi, dan nilai efisiensi.

**ISK.10** "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna "

ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 32. berikut ini.

Tabel 32  
Target ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	92,00 (Nilai)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, didapatkan realisasi capaian dengan nilai sebesar 93,44. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 33**. berikut ini.

Tabel 33  
 Hasil Capaian ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  
 Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	82,00	93,44	-	-	-	-	-	-	-	-	113,95

Berdasarkan informasi diatas, pada Triwulan II Tahun 2025 didapatkan capaian dengan Nilai sebesar 93,44 dari target Nilai 82,00 dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 113,95% dengan predikat "Istimewa". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Nilai capaian tersebut diperoleh dari ketaatan dan ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah kualitas perencanaan anggaran dengan baik, kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang baik.



"Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai Indeks pada Tahun 2025 sebesar 81,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 34. berikut ini.

Tabel 34  
 Target ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"  
 Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	81,00	-	-	-	-
---	-------	---	---	---	---

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, dilakukan pengukuran dimana didapatkan capaian dengan Nilai sebesar 81,56 dari target Nilai sebesar 77,00 dengan persentase pada aplikasi Kinerja sebesar 105,92%. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 35**. berikut ini.

Tabel 35  
Hasil Capaian ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	77,00	81,56	-	-	-	-	-	-	-	-	105,92

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 dengan nilai Indeks 77,00 telah tercapai dengan nilai Indeks 81,56 dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 105,92% dengan Predikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut belum dapat dibandingkan dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur berdasarkan aktifnya peran pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan workshop baik terkait tugas pokok maupun tugas tambahan dari masing-masing pegawai.

**ISK.12**

*"Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"*

ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM dengan target nilai pada tahun 2025 sebesar 88,00. Target Kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel 36. berikut ini.

Tabel 36  
Target ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	88,00 (Nilai)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode Tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 37**. berikut ini

Tabel 37  
Hasil Capaian ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"  
Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP

Tahun” dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra, terdapat target capaian nilai yang ditentukan sebesar 88,00 dan diharapkan dapat tercapai dengan baik.

**ISK.13**

*" Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahun"*

ISK.13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahun” ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 38. berikut ini.

Tabel 38  
Target ISK.13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahun”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahun	100,00 %	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahun” pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 39**. berikut ini

Tabel 39  
Hasil Capaian ISK.13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian

Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"  
Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, capaian pada Triwulan II Tahun 2025 mendapat persentase 100,00% dari target persentase 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Pada Triwulan II Tahun 2025 ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" memiliki capaian yang berpredikat "Baik" yang berarti mendapatkan nilai yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah dengan telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi tindak lanjut risiko yang terdapat pada matriks manajemen risiko.



*" Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan "*

ISK.14 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 95,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 40. berikut

ini.

Tabel 40  
Target ISK.14 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)		Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95,00 %		-	-	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target persentase yang ditetapkan sebesar 95,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 41. berikut ini.

Tabel 41  
Hasil Capaian ISK.14 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	95%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan II Tahun 2025 didapatkan capaian persentase sebesar 100,00% dari target persentase sebesar 95,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 105,26% berpredikat "Baik". Perhitungan ini didapatkan dari perhitungan jumlah rekomendasi yang

ditindaklanjuti. Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan telah diselesaikan dengan demikian persentase sesuai dengan target sebagaimana yang dijelaskan dalam manual IKU.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Diharapkan pada Triwulan tahun berikutnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.



*"Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"*

ISK.15 "Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target Nilai pada Tahun 2025 sebesar 88,50. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 42. berikut ini.

**Tabel 42**

Target ISK.15 "Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	88,50	-	-	-	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Nilai sebesar 88,50. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 43. berikut ini.

Tabel 43  
 Hasil Capaian ISK.15 " Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan  
 Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	88,50	98,41	-	-	-	-	-	-	-	-	111,20%

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan II Tahun 2025 didapatkan capaian Indeks sebesar 98,41 dari target indeks sebesar 88,50 dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 111,20% berpredikat "Istimewa". Perhitungan ini didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 di Stasiun PSDKP Tahuna yang dihitung melalui hasil survei dari penerima layanan SLO Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan jumlah 15 (lima belas) responden.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan, dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya dapat mencapai nilai yang sesuai dengan target ataupun melebihi target yang telah ditentukan.



*" Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"*

ISK.16 "Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 44.

berikut ini.

Tabel 44  
Target ISK. 16 “Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna”

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	-	-	-	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 45. berikut ini.

Tabel 45  
Hasil Capaian ISK. 16 “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Stasiun Psdkp Tahuna” Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.16 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum

dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra.

**ISK.17**

*" Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna "*

ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 46. Berikut ini.

Tabel 46  
Target ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 47. berikut ini.

Tabel 47  
Hasil Capaian ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode

pengukuran kinerja pada ISK.17 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Restra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

**ISK.18** "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target pada Tahun 2025 sebesar 1,00 unit. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 48. berikut ini.

Tabel 48  
Target ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	1,00 unit	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target yang ditetapkan sebesar 1,00 Unit. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 49. berikut ini.

Tabel 49  
Hasil Capaian ISK. 18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PSDKP Tahun											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.18 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari jumlah inovasi yang berhasil disusun dan berpartisipasi dalam lomba inovasi lingkup Ditjen PSDKP. Inovasi yang diusulkan dapat berupa inovasi pelayanan publik ataupun manajemen internal pelayanan perkantoran yang dapat memberikan nilai positif bagi pelayanan publik ataupun manajemen perkantoran.



*" Nilai Implementasi Program Budaya Kerja "*

ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 70,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 50. berikut ini.

Tabel 50  
Target ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup	70,00	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target yang ditetapkan Nilai sebesar 70,00.

Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 51. berikut ini

Tabel 51  
Hasil Capaian ISK.19 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”  
Triwulan II Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	TW II 2025		TW II 2026		TW II 2027		TW II 2028		TW II 2029		Persen
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.19 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari tercapainya target pada komponen penilaian 1. Tim Satker; 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); 3. Lima Menit Sebelum Jadwal; 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R); 5. Upayakan Data Terkini (UPDATE); 6. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA); 7. Tegakkan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT); 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA); 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK); 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP); 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS); dan 12. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (*Go Green*).

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 7 “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP” dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2355 dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada Tabel 52. sebagai berikut.

Tabel 52  
Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 8 “Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan” Pada Stasiun PSDKP Tahuna

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.7	2355	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	Rp. 6.789.908.000	Rp. 5.364.532.000	Rp.2.946.350.709	43.39%
ISK.15		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna		Rp. ,-	Rp. ,-	
ISK.16	2355.EBD.961	Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna	Rp. 143.235.000			-
ISK.18		Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna				
ISK.13		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup PSDKP Tahuna				
ISK.14	2355.EBA.963 2355.EBA.958 2355.CAN.001 2355.EBD.955 2355.EBA.994	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	Rp. 5.884.191.000		Rp. 1.478.687.724	30,75%
ISK.10	2355.EBD.952	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Rp. 4.809.430.000		

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW II Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
		Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna				
ISK.9		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Stasiun PSDKP Tahuna				
ISK.17	2355.EBD.974	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP	Rp. 43.050.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-
ISK.11	2355.EBC.954	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Rp. 69.300.000	Rp. 6.318.000	Rp. ,-	-
ISK.12	2355.EBD.953	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	Rp. 55.650.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-
ISK.19	2355.EBA.960	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Rp. 53.088.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-

Penjelasan warna:      Sasaran Kerja      Indikator Sasaran Kinerja

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.8 Tahun 2025 sebesar Rp. 6.789.908.000,-. dan pagu real sebesar Rp. 4.985.828.000. Berdasarkan perhitungan sampai akhir Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.543.919.204,- (30,97%). Dengan rincian untuk ISK.15, ISK.16, dan ISK.18 yang tergabung dalam satu kode mata anggaran 2355.EBD.961 dengan alokasi anggaran Rp. 143.235.000 dengan pagu real sebesar Rp. 9.146.000 realisasi sebesar Rp. ,- persentase sebesar 0%. ISK.9, ISK.10, ISK.13, dan ISK.14 yang tergabung dalam 6 (Enam) mata anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 5.884.191.000 dengan pagu real sebesar Rp. 4.809.430.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.478.687.724,- persentase sebesar 30,75%. ISK.17 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. ,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 43.050.000 dengan persentase -%. ISK.11 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. ,- dan pagu real sebesar Rp. 6.318.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 69.300.000 dengan

persentase -% ISK.12 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. ,- dari alokasi anggaran Rp. 55.650.000 dan pagu real sebesar Rp. ,- dengan persentase sebesar -%. ISK.19 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. ,- dari alokasi anggaran Rp. 53.088.000 dan pagu real sebesar Rp. ,- dengan persentase sebesar -%

### C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Dalam pembentukan UPT Stasiun PSDKP Tahuna melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016, jumlah PNS UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berjumlah 8 (delapan) orang dan di Satwas SDKP Talaud berjumlah 1 (satu) orang. Sampai dengan awal tahun 2025, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 31 (tiga puluh satu) ASN terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) PNS, 4 (Empat) PPPK di Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, 3 (tiga) ASN di Satwas SDKP Talaud dan 11 (sebelas) ASN sebagai awak kapal pengawas perikanan. Selanjutnya Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 17 (Tujuh Belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah terekam dalam aplikasi e-Pegawai KKP.

Informasi terkait komposisi, golongan, pangkat, pendidikan dan kualifikasi, lokasi penempatan ASN dan PPNPN dapat dilihat pada Tabel 53 dan 54 dibawah ini.

Tabel 53  
Komposisi Golongan dan Kualifikasi Pendidikan ASN Stasiun  
PSDKP Tahuna

No	Jabatan	Golongan			Jumlah	Kualifikasi Pendidikan					Jumlah
		I	II	III		S2	S1/ DIV	DIII	SMA / SMK / SUPM	SMP	
1	Kepala Stasiun	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
2	Ketua Tim Kerja	-	-	5	5	-	4	-	1	-	5
3	Pejabat Fungsional (Pengawas Perikanan)	-	5	1	6	-	1	3	2	-	6
4	Pelaksana	-	9	10	19	-	3	8	8	-	19

Tabel 54  
Daftar PPNPN dan PJLP di UPT Stasiun PSDKP Tahuna

No	Penempatan Kerja	Jumlah PPNPN/PJLP
1	Stasiun PSDKP Tahuna	14
2	Satwas SDKP Talaud	3
Jumlah		17

Nilai pagu anggaran Tahun 2025 yang telah dianggarkan untuk lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp. 14.293.185.000,- dengan pagu real sebesar Rp. 6.841.880.000,- dimana sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, terdapat realisasi anggaran senilai Rp. 1.786.887.816,- dari sisa pagu real dengan persentase 26,12%. Adapun rincian realisasi untuk Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 55. berikut ini.

Tabel 55  
Rincian Realisasi Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Tahuna

Kode	Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persen
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	6.930.075.000,-	6.305.122.000,-	964.859.961,-	15,30%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	196.455.000,-	38.742.000,-	22.170.712,-	57,23%
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	376.747.000,-	30.320.000,-	2.850.000,-	9,40%
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	6.789.908.000,-	5.364.532.000,-	2.946.350.709,-	54,92%
Total Anggaran dan Realisasi		14.293.185.000,-	11.738.716.000,-	3.936.231.382,-	33,53%

Pada kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 964.859.961,- dengan persentase 15,30%

dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 6.305.122.000,-. Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 22.170.712,- dengan persentase 57,33% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 38.742.000,-. Dari kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 2.850.000,- dengan persentase 9,40% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 30.320.000,-. Dari kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai realisasi sebesar Rp. 2.946.350.709,- dengan persentase 54,92% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 5.364.532.000,-. Serapan anggaran pada Kode 2350, 2351, 2352, dan 2355 termasuk baik karena sesuai dengan target serapan Triwulan II Tahun 2025.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Stasiun PSDKP telah menetapkan 19 (Sembilan Belas) Indikator Sasaran Kinerja (ISK), dimana Stasiun PSDKP Tahuna telah mengidentifikasi menjadi 8 (Delapan) IKU dan 11 (Sebelas) IKM yang melekat pada 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan pada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- c. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja sepanjang Triwulan II Tahun 2025, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- d. Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 104,63 dengan predikat "Baik".

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 dan evaluasi capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rekomendasi dan tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel 56. sebagai berikut:

Tabel 56  
Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Tindak Lanjut	Hambatan
1.	Jumlah kegiatan pengawasan yang masih kurang baik dari bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan maupun bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Melakukan rapat monev terkait dengan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan serta membuat jadwal pengawasan di setiap bulan pada Triwulan berjalan	Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

Tabel 56  
Rekomendasi Penutup dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja  
Triwulan II Tahun 2025

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Tindak Lanjut	Hambatan
1.	Jumlah kegiatan pengawasan yang masih kurang baik dari bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan maupun bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Melakukan rapat monev terkait dengan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan serta membuat jadwal pengawasan di setiap bulan pada Triwulan berjalan	Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan

# LAMPIRAN